

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara (Mirza, 2012). Meier dan Stiglitz dalam Kuncoro (2010) juga berpendapat bahwa pada generasi kedua, teori pembangunan banyak menekankan pada akumulasi modal sumber daya manusia dengan menciptakan agen-agen pembangunan yang lebih produktif melalui pengetahuan, kesehatan, nutrisi yang lebih baik, dan peningkatan keterampilan.

Teori pertumbuhan baru yang dikemukakan oleh Paul Romer telah memasukan unsur human capital dan teknologi sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital), peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat ditunjukkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pada manusia. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan menurut Mudrajat Kuncoro (2004) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang

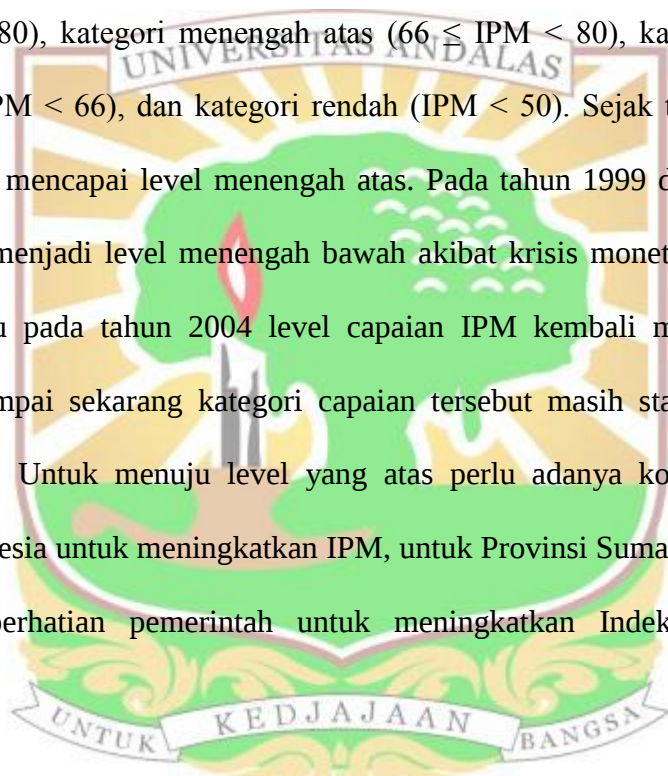
buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran.

Mengutip pendapat Nurske, Jhingan (2004) dan Mudrajad Kuncoro (2004) menyatakan bahwa negara/daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, umumnya terjat ke dalam lingkaran kemiskinan (*vicious circle*). Nurske menjelaskan bahwa lingkaran kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain berinteraksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara/daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi tetap berada dalam keadaan terbelakang, sehingga kemiskinan adalah sebab sekaligus akibat.

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2012). Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini pada akhirnya akan berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Sama seperti wilayah lain di Indonesia, masalah kemiskinan di Sumatera Barat juga masih tergolong tinggi. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan tujuan untuk kedepannya pemerintah lebih bisa menanggulangi masalah kemiskinan agar tingkat pembangunan manusia di Sumatera Barat membaik.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2013. IPM Indonesia naik 1,04 poin dalam jangka waktu 3 tahun. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Indonesia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin membaik.

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi kategori tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$), kategori menengah bawah ($50 \leq IPM < 66$), dan kategori rendah ($IPM < 50$). Sejak tahun 1996, IPM Indonesia telah mencapai level menengah atas. Pada tahun 1999 dan 2002 capaian tersebut turun menjadi level menengah bawah akibat krisis moneter yang melanda Indonesia. Baru pada tahun 2004 level capaian IPM kembali meningkat seperti semula dan sampai sekarang kategori capaian tersebut masih stagnan pada level menengah atas. Untuk menuju level yang atas perlu adanya koordinasi disetiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan IPM, untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri masih perlu perhatian pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia-nya.



Fenomena yang terjadi di Sumatera Barat perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2004- 2011 membaik, IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 mencapai 74,28 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM nasional (72,77), dengan ranking IPM 4 Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 menduduki peringkat ke 9 secara nasional setelah Sumatera Utara dan peringkat ke 4 di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota tahun 2011, IPM tertinggi adalah Kota Bukit Tinggi (78,73) dan menduduki peringkat ke-11 secara nasional, dan IPM terendah adalah Kepulauan Mentawai yaitu 69,06 dan

berada di peringkat ke- 383 secara nasional. Sementara Perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2008-2013, secara absolut terjadi penurunan sebanyak 69,73 ribu jiwa, jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) sebanyak 407 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 mencapai 8,14%. Kondisi kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional 11,37%. Bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan yang relatif besar, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara berangsur naik kembali.

Untuk mewasdai terjadinya penurunan IPM yang pernah terjadi di Sumatera Barat, pemerintah harus tetap memperhatikan penduduk Sumatera Barat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan serta keiskinan. Karena pendidikan dan kesehatan ini merupakan dua hal yang paling penting untuk diperhatikan, pendidikan dan kesehatan ini merupakan hal yang dapat menunjang ekonomi suatu negara, dimana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hingga selanjutnya akan mengurangi penduduk miskin. Kemudian sebaliknya dimana tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi akibat dari tidak diperhatikannya pendidikan dan kesehatan ini, oleh karena itu pembangunan manusia dari segi pendidikan dan kesehatan harus sangat diperhatikan. Sehingga kemiskinan yang terjadi maka akan dapat menghambat individu untuk mengkonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak, serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup

sehat. Dari sudut pandang ekonomi keseluruhan hal tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dikatakan maju bukan saja dilihat dari angka kemiskinannya saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan (Widodo dkk, 2011).

Salah satu alat ukur yang lazim digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan yang sangat mendasar yaitu : kemiskinan, kesehatan, serta kualitas pendidikan masyarakat suatu daerah. Berdasarkan dari keterangan dan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berjudul : Pengaruh Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat?

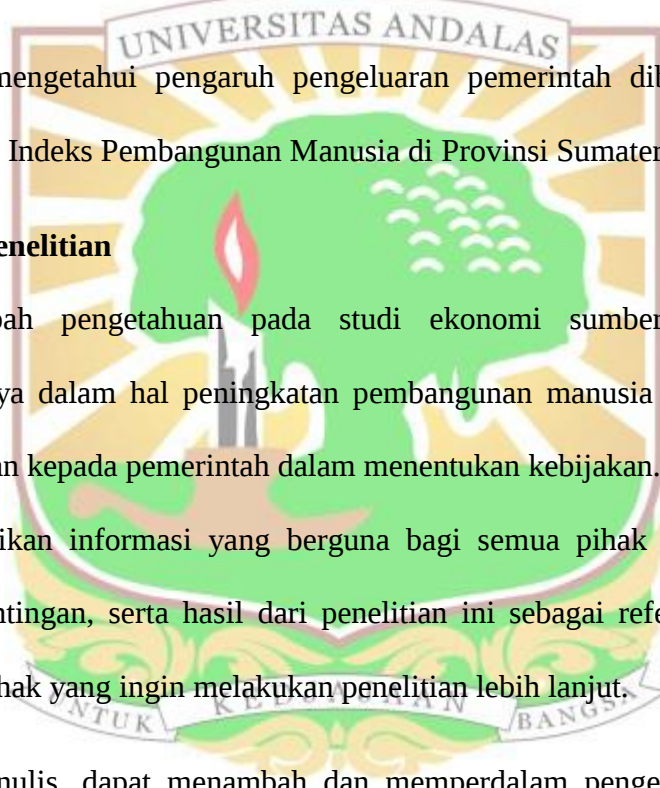
3. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan pada studi ekonomi sumber daya manusia khususnya dalam hal peningkatan pembangunan manusia dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan, serta hasil dari penelitian ini sebagai referensi atau acuan untuk pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi penulis, dapat menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat.



1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Sumatera Barat. Faktor-faktor yang menjadi variabel bebas dalam penelitian terdiri dari tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan. Sedangkan tujuan akhir penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Daerah yang menjadi objek penelitian adalah Provinsi Sumatera Barat dengan data yang digunakan dimulai dari tahun 2013 hingga 2017.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Literatur, Metode Penelitian, Gambaran Umum Daerah Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan dan Saran. Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori, penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian, kerangka konseptual, serta hipotesa yang terkait mengenai

pengaruh penerimaan pajak, tingkat investasi, dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis serta sumber data, variabel-variabel yang digunakan, metode analisa data, serta alat analisa dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang gambaran umum dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan temuan empiris dari hasil regresi dan pembahasannya serta menjelaskan implikasi kebijakan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada Bab V, selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

